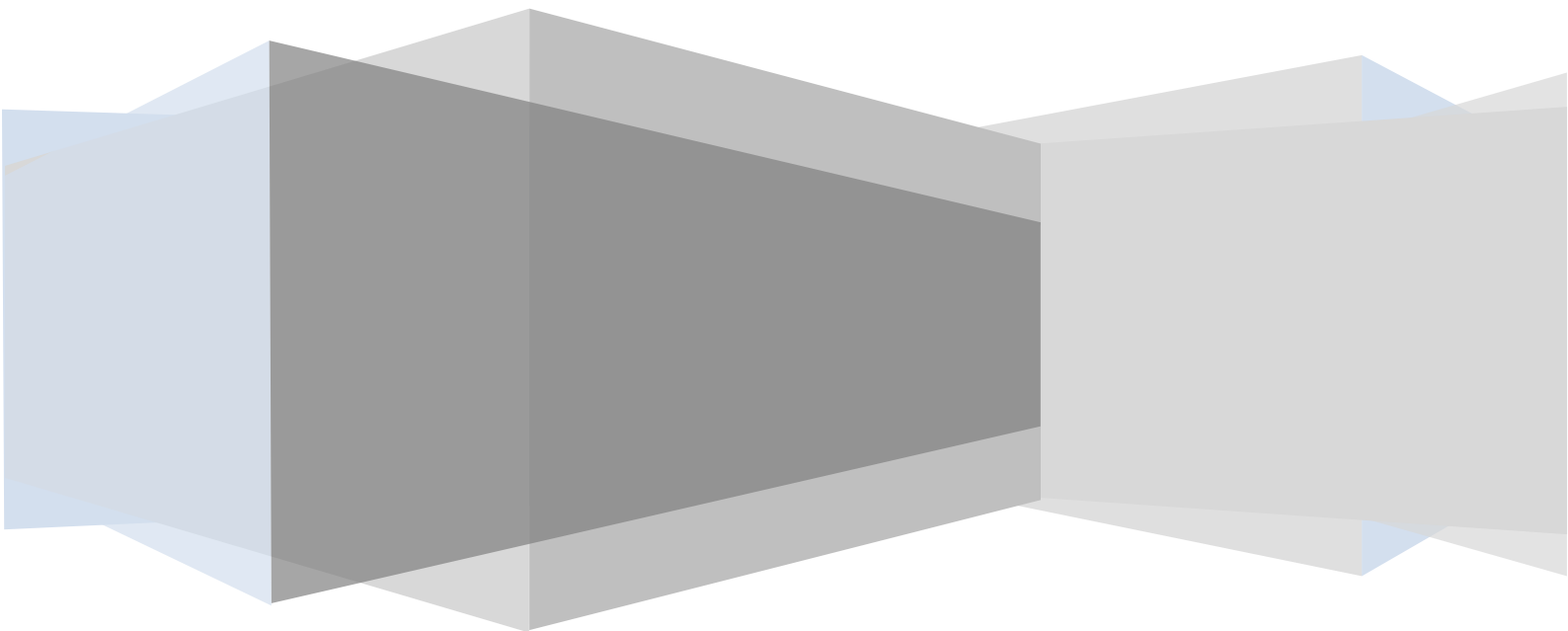




**DINAS PANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH(LKIP)**

TAHUN 2022



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “*good governance*”. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas

kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (Key Performanca Indicator) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2016, Tanggal 06 Oktober 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung yang dibentuk pada Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Dinas Pangan Kota Bandar Lampung beroperasi pada Bulan Januari 2017.

Kedudukan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Kedudukan

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Organisasi

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melaksanakan Tugas pokok menyelenggarakan kewenangan pemerintah Daerah di Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Walikota Bandar Lampung, Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung.

Tugas pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Kota Bandar Lampung mengacu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung. Susunan organisasi Dinas Pangan Kota Bandar Lampung diuraikan sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan.
- c. **Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan** :
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- d. **Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan**: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- e. **Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal** :
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- f. **Bidang Keamanan pangan** : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan
- g. Unit pelaksana Teknis
- h. kelompok jabatan Fungsional

Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud sekretaris dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan
-
- a. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, mempunyai tugas sebagian tugas Dinas di Bidang Ketersediaan Sumber Daya dan Kerawanan Pangan yang meliputi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - b. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, mempunyai sebagian tugas Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas di Bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, dan Cadangan Pangan. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - c. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal, dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Keamanan Pangan. Bidang

Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Pangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Rencana Strategis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Penyusunan LAKIP Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022 berdasarkan penilaian pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2022

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022, dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kota Bandar Lampung untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan analisis kinerja terhadap kegiatan-kegiatan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 yaitu bersumber dari Dana APBD Tahun 2022.

1.3 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Kepemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Sehubungan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Kota Bandar Lampung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 41 orang yang terdiri dari 29 orang berstatus PNS, 12 orang Tenaga Honorer/Tenaga Kontrak. Jumlah SDM Dinas Pangan Kota Bandar Lampung secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. Jumlah Pegawai pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Sumber: Laporan Mutasi Barang per. 31 Desember 2022 (Semester IV) pada Dinas

N o.	Eselon/Non	Pendidikan							Golongan				Non PNS	Σ
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLT P	S D	IV	III	II	I		
1	Eselon II	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4
3	Eselon IV	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Sub Jumlah		6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6
4	Non Eselon	3	12	-	-	-	-	-	4	11	-	-	-	15
5	Fungsional	5	3	-	-	-	-	-	5	3	-	-	-	8
8	Tenaga Kontrak	-	8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	12	12
Sub Jumlah		9	-	-	-	4	-	-	9	14	-	-	12	41
Jumlah		14	23			4			15	14			12	41

sumber : Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2022 (data diolah)

1.4 Sarana dan Prasarana

Kantor Dinas Pangan Kota Bandar Lampung berada di JL. Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telp (0721) 250466 Bandar Lampung 35214.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pangan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Pendukung pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung

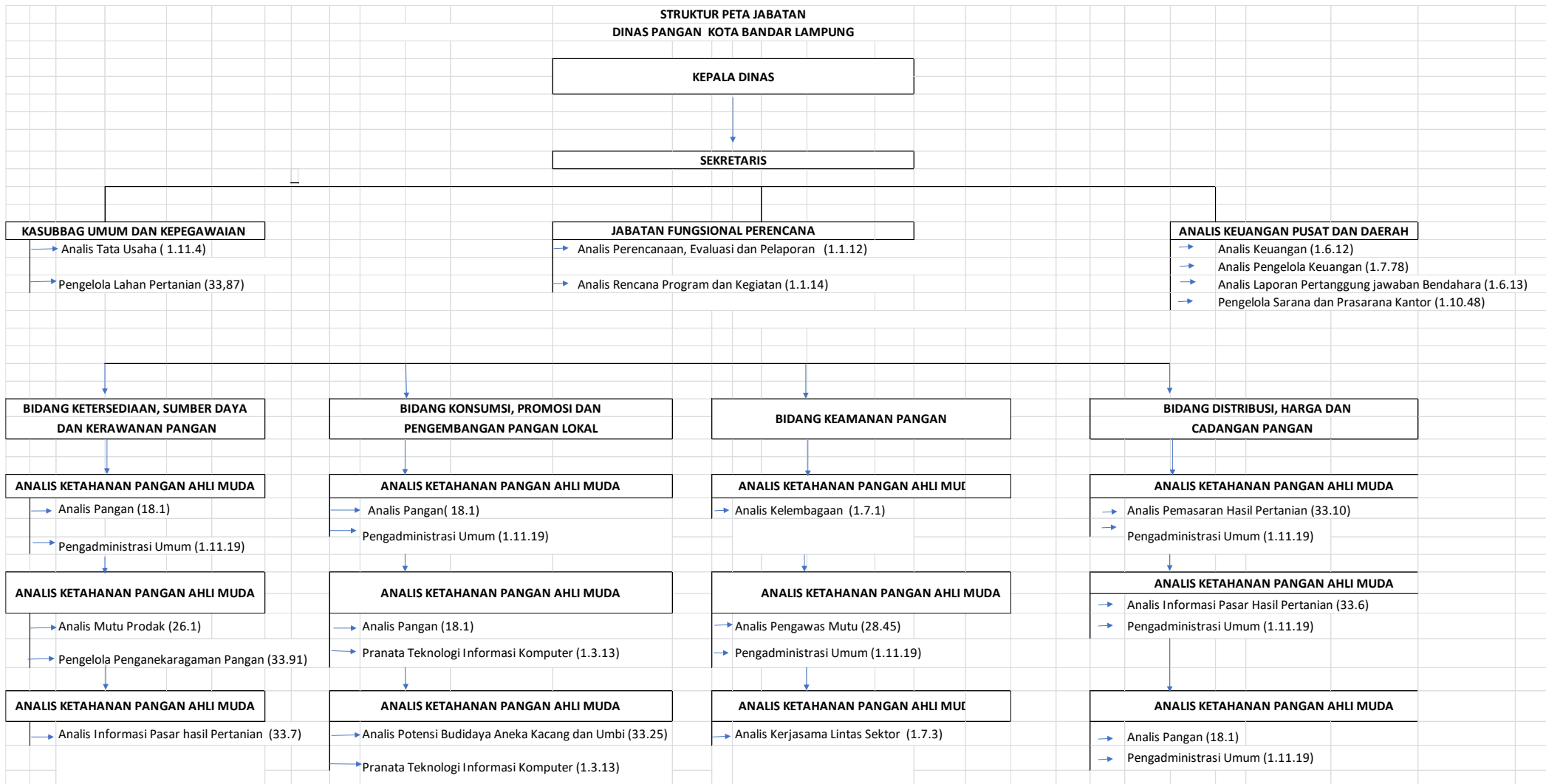
No.	Nama Barang	Type/Jenis	Ukuran/ Luas	Jumlah	Kondisi
1.	GudangPangan dan Lantai Jemur	Gudang Lantai jemur	8x10 m ² 3x6 m ²	1 Unit 1 Unit	Rusak Baik
2.	Kendaraan Roda 4 Roda 2	Toyota Inova Sepeda Motor	2000 CC 100 CC	1 Unit 14 Unit	Baik Baik
3.	Peralatan Kantor Mesin Tik Komputer PC Laptop Printer LCD UPS Wireless Kamera OHP AC Mesin Penghancur kertas Brankas Whiteboard Lemari Arsip Filling Kabinet Kursi Meja			6 Unit 15 Unit 8 Unit 10 Unit 1 Unit 11 Unit 3 Buah 3 Unit 1 Unit 7 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 11 Unit 8 Unit 198 Unit 75 Unit	1 Baik dan 5 rusak Baik Rusak Baik , 6 Baik 18 rusak Baik rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber: Laporan Mutasi Barang per. 31 Desember 2022 (Semester IV) pada Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, 2022 (data diolah)

1.5 Sumber Daya Keuangan

Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar **Rp 8.049.801.268,-** (setelah perubahan) termasuk gaji dan tunjangan ASN. Adapun nama Program dan Kegiatan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada APBD Kota Bandar Lampung T.A. 2022 dapat dilihat pada Laporan Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Bab III.

Struktur Organisasi Dinas Pangan



II. PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2022, Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melaksanakan tujuan, sasaran, kebijakan dan kegiatan sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kota Bandar Lampung, yang akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pangan Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kinerja pada Akhir Tahun Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan		Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar Lampung (no hungry)	92							100%
		1. Meningkatkan penyelenggaraan urusan Pangan	Hasil penilaian kuantabilitas kinerja OPD oleh Inspektora t Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	74.8	74.94	75	75.1	75.2	75,31	75,41	75,41

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Kinerja pada Akhir Tahun Renstra
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		2. Terpuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi dan Seimbang	SKOR PPH	85.5	86	86.2	86.50	86,75	87	87	87
		3. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	persentase jumlah sampel pangan segar yang diujikan mandam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diujikan dalam kurun waktu 1 tahun	85	85.5	86	87	87.5	88	88	88

2.1.2 Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan	1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	Meningkatkan pemenuhan Penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pangan	1. Optimalisasi system perencanaan, pelaporan dan evaluasi penganggaran dan kinerja OPD
	2. Terpuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam,	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1. Meningkatkan peran pemerintah dan kelembagaan lokal dalam penganekaragaman pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Bergizi dan Seimbang		<ul style="list-style-type: none"> 2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah 3. Pengembangan sistem informasi pasokan, harga dan akses pangan 4. Pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai AKG
		Meningkatkan Penanganan daerah rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan daerah rawan pangan transien dan kronis 2. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Percepatan Penyusunan Petakan dan Kerentanan Pangan
	3. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan terutama PSAT (pangan segar asal tumbuhan) 2. Penyediaan sarana prasarana pengujian 4. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)

2.1.3. Program

Berbagai strategi dan kebijakan sebagai upaya untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2022, dioperasionalkan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mengacu pada program pembangunan tahun 2021-2026. Pada tahun 2022 terdapat 4 Program yang terbagi dalam kegiatan dan sub kegiatan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.4.2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.4.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.5.1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

2.1.1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

2.1.2. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota

2.2.1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota

2.3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2.3.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

2.3.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

3.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

3.1.1. Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

3.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.2.1. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

4.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

4.1.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana kinerja yang direncanakan pada Tahun 2022 merupakan implementasi rencana jangka menengah ke dalam rencana kerja jangka pendek yang mencakup tujuan dan sasaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja. Sasaran Kinerja Tahun 2022 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pangan adalah seperti dijelaskan dalam table berikut (Tabel 5)

Tabel 5. Tabel Rencana kinerja yang direncanakan pada Tahun 2022

SASARAN	KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022) YANG DIEVALUASI	
	URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				4	5
2	3					4	5	6	9	
							Tolak Ukur		K	Rp
							Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar lampung (no hungry)	%		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Meningkatnya penyelenggaraan urusan urusan Pangan	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	nilai	98	8.049.801.268
	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan		98	3.750.753.143
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100	34.386.900
	2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen		34.386.900
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	100	3.050.533.998
	2	09	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali		2.983.173.998,00

						jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31	
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen		67.360.000
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD	%	98	120.566.945
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	2.441.295
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	10.903.500
2	09	01	2.06	03	Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket		12.332.150
						jumlah paket barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket	1	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok		2.340.000
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	1	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen		11.500.000
						Jumlah laporan fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan		76.050.000
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	
2	09	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		%	100	50.000.000

2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	10	50.000.000
2	09	01	2.08		Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD	%	98	358.750.000
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan		
						Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket		
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan		
						jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1	358.750.000
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara	%	98	136.515.300
	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit		
2						jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1	31.872.100
	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit		
2						jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16	104.643.200
Terpenuhi						Skor PPH	skor		

Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman Untuk Memenuhi kecukupan Energi perkapita	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						4.010.048.125,0
							Ketersediaan Pangan Utama	%		98		
							Ketersediaan energi per kapita	kcal/Kap/hari		2500		
							Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari		72,1		
							pencapaian skor PPH			85,5		
	2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%		98		275.428.125
	2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen				
							Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan		1		44.020.000
	2	09	03	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen				
							Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan		1		30.800.000
	2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen				
							Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan		1		200.608.125
	2	09	03	2,02		Pengelolaan keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah (per 100 ton)	%				3.700.000.000
3	09	03	2,02	04	Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton				3.700.000.000	

						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	320		
2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)	skor	86	34.620.000	
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen		34.620.000	
						Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	1		
2	09	03	2,04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan pameran			230.156.000	
						Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung				
						terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan				
						jumlah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan	2		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		3	%	7	149.000.000
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dihasilkan	dokumen	1	49.000.000	
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen		49.000.000	
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	1		
2	09	04	2,02		Kegiatan penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota	persentase daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani	%	100	100.000.000	

	3	09	04	2,0 2	02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan Yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	1	100.000.000
	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	85,5	140.000.000
	2	09	05	2,0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	%	85,5	140.000.000
	2	09	05	2,0 1	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih, dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)		70.000.000
							KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	1	
	2	09	05	2,0 1	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	70.000.000
						Jumlah Total Anggaran Seluruh Program				8.049.801.268

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Rincian target dan tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran yang dilaksanakan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 6.

Dinas Pangan melaksanakan empat program pada Tahun Anggaran 2022 diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi, Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal, Bidang Keamanan Pangan serta Sekretariat Dinas Pangan. Pengukuran capaian kinerja Dinas Pangan tersebut dilaksanakan secara tahunan, sedangkan pengukuran realisasi keuangan dan fisik output kegiatan dipantau secara bulanan dan triwulanan melalui Laporan realisasi fisik dan keuangan dan Laporan Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran untuk Kabupaten/Kota kepada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Bandar Lampung.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja utama dan SPM Bidang Ketahanan Pangan. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Pangan yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Analisis dan evaluasi capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Beberapa sasaran dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang saling terkait untuk mencapai sasaran tersebut. Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 6. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		(TAHUN 2020)	TAHUN 2021		TINGKAT CAPAIAN 2021	TAHUN 2022		TINGKAT CAPAIAN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TARGET KINERJA
			TARGET KINERJA	REALISASI		TARGET KINERJA	REALISASI		TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA	
1	2	3	4			5			6	7	8	9	10
IKU													
Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung	Skor	74.8 (BB)	75,01-77,00	70.31		77.01-78,00	belum ada		78,01-79,00	79,01-80,00	80,01-81,00	80,01-81,00	80,01-81,00
Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor	85.5	86	85	99	86.2	88,20	102%	86.5	87	87	87	87
Persentase jumlah sampel pangan segar yang diujikan mandalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diujikan dalam kurun waktu 1 tahun	persen	85	85.5	86	100	86,00	85,50	99,41%	87	87.5%	88	88	88
IKK													
Ketersediaan Pangan Utama	%	92.	95	98	103	98	100	102%	100	102	105	110	110
Ketersediaan Energi per kapita	(kkal/kap/hari)	2.490	2.500	2.490	100	2.510	3.096	123%	2.520	2.530	2540.00	2550.00	2550.00
Ketersediaan Protein per Kapita	(gr/kap/hari)	72.10	72.14	60	83	72.16	63,00	0,87	72.18	72.20	72.22	72.25	72.25

Penguatan Cadangan Pangan	%	24.08	24.08	-	-	30.00	320	1100%	40.00	50.00	60.00	60.00	60.00
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	85.5	86	85	99	86.2	88.20	102%	86.5	86.75	87	87	87
Persentase daerah rawan pangan	%	8.7 rawan pangan (11 kel / 126 kel)	8.00	8	100	7.00	3.17	383%	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	85	85.5	85.50	100	85.50	85	99%		87.5	88	88	88

Table 8 menggambarkan Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas Pangan. Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas Pangan yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.di bawah ini rincian analisis tiap indikator

1. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung

Hasil ini dioperoleh dari skor penilaian akuntabilitas kinerja dinas pangan yang mencakup penilaiin beberapa komponen yaitu

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Internal
- Pencapaian Sasaran/kinerja organisasi

Berdasarkan skor tahun 2020 hasil evaluasi masuk kategori “Sangat Baik” yaitu dengan nilai 73.91 (BB), skor tahun 2021 sebesar 70.31 “Sangat Baik” sedangkan tahun 2022 masih dalam tahap evaluasi oleh inspektorat Kota bandar lampung

2. Skor pola pangan harapan (PPH)

PPH merupakan instrument sederhana untuk mengukur situasi konsumsi pangan penduduk, semakin tinggi skor PPH , maka konsumsi pangan masyarakat tersebut semakin beragam,bergizi dan seimbang. Skor PPH Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 85,50 ,Skor PPH kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021, (menggunakan dataproeksi tahun N-1) yaitu sebesar 85.4 sedikit lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 86. Sedangkan tahun 2022 Skor PPH 88,20, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu

86.20 Dengan besarnya nilai PPH berarti pemahaman masyarakat bandar lampung akan pangan beragam, bergizi dan seimbang semakin baik

3. Persentase jumlah sampel pangan segar yang diuji dan aman dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diuji dalam kurun waktu 1 tahun Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu pengujian keamanan pangan pada beberapa sampel pangan segar di beberapa titik pasar tradisional dan pasar modern. Capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah 85.5 % sesuai target yang telah ditetapkan. Kegiatan penguatan kelembagaan dilakukan melalui acara sosialisasi kepada penyuluh pertanian dan juga pelaku usaha, dimana target pelaksanaan tercapai 100%.

4. Ketersediaan Pangan Utama

Pengertian Ketersediaan Pangan adalah Kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Persentase **ketersediaan pangan utama** (beras) Formulasi perhitungan : (Jumlah **ketersediaan pangan** (beras) dibagi jumlah kebutuhan konsumsi selama satu tahun) dikali 100% . Tingkat ketersediaan pangan kota bandar lampung dapat dikatakan tercukupi ketersediaannya, karena kota bandar lampung merupakan terminal hasil pertanian dari kabupaten di sekitarnya seperti kota Metro, Kabupaten lampung tengah dan kabupaten Pringsewu yang merupakan pemasok beras utama. tingkat capaian ketersediaan pangan tahun 2022 yaitu 100%

5. Ketersediaan Energi per kapita

Tingkat ketersediaan energi per kapita Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Adapun sumber ketersediaan energy dapat berupa, beras, jagung, ketela,.ubi, talas dan lain lain.Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) Pengelolaan cadangan pangan.

Rekomendasi Kemenkes yaitu 2.400 kalori perkapita per hari untuk konsumsi energi. Pada tahun 2021 ketersediaan energy perkapita mencapai 2490 kalori/kap/hari. Sedangkan tahun 2022 ketersediaan energi perkapita sebesar 3.096 Nilai ini didapat dari perhitungan neraca bahan makanan hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi kota Bandar Lampung surplus.

6. Ketersediaan protein per kapita

Tingkat ketersediaan protein per kapita berfungsi menjamin pasokan protein untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Sumber protein berasal dari daging, dagingan, ikan, kacang kacangan, telur, susu dll. Hasil penyusunan NBM Kota Bandar Lampung diperoleh angka ketersediaan protein tahun 2021 sebesar 60 kalori/kapita/hari dari target 72.14 kal/kap/hari. Pada tahun 2022 diperoleh angka ketersediaan protein sebesar 63 kal/kap/hari

7. Persentase Daerah Rawan Pangan

Secara teknis dari sisi waktu kejadiannya, kerawanan pangan dibagi menjadi 2 bagian yaitu : “Kerawanan Pangan Transien dan Kerawanan Pangan Kronis. **Kerawanan Pangan Transien** adalah : suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan karena bencana baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (misalnya banjir ataupun konflik sosial, dll). **Kerawanan Pangan Kronis**

adalah : suatu kondisi ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi standart minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan

Penanganan rawan pangan dapat dilakukan pertama melalui deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan pangan pada suatu wilayah, melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dengan SKPG dapat dilakukan pencegahan sehingga tidak terjadi kerawanan pangan transien suatu wilayah.

Kedua, melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang telah mengalami kerawanan pangan kronis melalui program-program rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan pangan transien melalui bantuan social.

Tahun 2022 dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung melalui pembagian beras cadangan pangan pemerintah sebanyak 320 ton untuk mengurangi dampak inflasi harga dan kenaikan BBM yang merupakan hasil tindak lanjut dari Surat edaran Mendagri Nopmor 500/4825/SJ tentang penggunaan belanja tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, untuk mengurangi dampak inflasi harga dan kenaikan BBM kepada masyarakat kurang mampu di 20 kecamatan.

Sebagai gambaran adapun data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bandar Lampung kurun waktu Tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya.,akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan, kemungkinan akibat pandemi covid yang berkepanjangan, tingginya inflasi

Tabel 7. Persentase jumlah penduduk Miskin Kota Bandar Lampung 2016- 2020 (ribuan)

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2016	10.15
2017	9.94
2018	9.04
2019	8.71
2020	8.81
2021	9.11

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2022

Di Tahun 2022 dalam rangka pengurangan kemiskinan dan rawan pangan serta mengurangi dampak inflasi dan kenaikan BBM, dinas pangan melaluan pembagian beras cadangan pangan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu di 20 kecamatan sebesar 320 ton.

Dinas Pangan melaksanakan empat program pada Tahun Anggaran 2022, adapaun tingkat capaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dijabrkan dalam tabel 8. Pada Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022 (Tabel 8), terdapat 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan; capaian kinerja tercapai 98% sesuai target , dengan realisasi keuangan 90 % (Rp. 3.500.539.883,-)
2. Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman Untuk Memenuhi kecukupan Energi perkapita ; capaian kinerja capaina kinerja diukur melauai pencapaian skor PPH 88.2, tingkat capaian tahun 2022 sebesar 102%

3. Terjaminnya keamanan dan mutu Pangan Segar , capaian kinerja diukur dengan Persentase jumlah sampel pangan segar yang diuji dan aman dalam kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah total sampel yang diuji dalam kurun waktu 1 tahun,. Realisasi kinerja tahun 2022 diperoleh angka 85 dengan tingkat capaian kinerja 99 % untuk tahun 2022

8. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan manusia. Berdasarkan SPM Bidang Ketahanan Pangan bahwa target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan adalah 85%. Di Kota Bandar Lampung pada Tahun Anggaran 2022.

Program Pengawasan keamanan pangan pada tahun anggaran 2022 diperkuta dengan terealisasinya 2 sub kegiatan yaitu (1)Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota melalui dana APBN (2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota. Penguatan kelembagaan keamanan pangan difokuskan memperkuat kelembagaan untuk pelayanan registrasi PSAT yang baru dirintis pada tahun 2022

3.2. Realisasi Anggaran

Total anggaran tahun 2022 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 8.0498.801.268,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.776.651.517,- Uraian Capaian Program dan Kegiatan Dinas Pangan Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupetn/Kota sebesar Rp. 3.750.753.143,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.461.384.997,00 atau 92%. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan dengan capaian indikator sebesar 98% beberapa penyebab serapan kurang diantaranya karena tunjangan kinerja pegawai dan honor tenaga yang tidak tercapai 100 %.

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.34.386.900,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 29.530.400,00 atau 85.88%.% yang memiliki target capaian kinerja 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen (100%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.983.173.998,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.764.415.097,00 atau 92.67% yang memiliki target capaian kinerja 6 dokumen dan terealisasi 6 dokumen (100%).

- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan sebesar Rp. 67.360.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 62.560.000,00 atau

92.87% yang memiliki target capaian 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor sebesar Rp. 2.441.295,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.440.000,00 atau 99.95% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 10.903.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.853.500,00 atau 99.95% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 3) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor sebesar Rp. 4.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.500.000,00 atau 100% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 4) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan sebesar Rp. 12.332.150,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.322.350,00 atau 100% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 5) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –Udangan sebesar Rp. 2.340.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.340.000,00 atau 100% yang memiliki target capaian kinerja 1 paket dan terealisasi 1 paket (100%).
- 6) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 11.500.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.100.000,- atau 87.83%, dan memiliki target capaian 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

- 7) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi sebesar Rp. 76.050.000,00 dan terealisasi Rp. 61.0558.800,00 atau 99.46% yang memiliki target kinerja 1 laporandan terealisasi 1 laporan

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tidak dianggarkan tahun 2022
- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 358.750.000,00, terealisasi Rp. 308.000.000,- atau sebesar 85.85% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.31.872.100 dan terealisasi Rp. 27.579.510 atau 86.53% yang memiliki target kinerja 1 unit dan terealisasi 1 unit
- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan sebesar Rp.104.643.200,00 dan terealisasi Rp.100.826.500,- atau 96.35% yang memiliki target kinerja 16 unit dan terealisasi 16 unit

2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan sebesar Rp. Rp. 44.020.000,00 terealisasi Rp.39.427.400,-atau 89.57% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan
- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sebesar Rp. 30.800.000,00 terealisasi Rp. 2.412.500,-atau sebesar 7.83%, memiliki target kinerja 1 laporan dan belum terealisasi karena kendala pendanaan
- 3) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan sebesar Rp. 200.608.125,00 terealisasi Rp.136.469.000,- atau sebesar 96.51% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

b. Pengelolaan Keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.700.000,00 dan terealisasi Rp.3.699.956.920,-atau sebesar 100% yang memiliki target kinerja 44 ton dan terealisasi 320 ton penambahan cadangan pangan disebabkan penambahn angrgan dari Rp. 164.776.000 menjadi Rp. 3.700.000.000,00 sebesar karena adanya perintah dari kementerian keuangan untuk melakukan upaya pencegahan dampak inflasi dan kenaikan BBM.

c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun, sebesar Rp. 34.620.000,00 realisasi keuangan Rp.28.237.000,-atau sebesar 81.65%, yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen
- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, realisasi keuangan Rp.185.717.100,-atau sebesar 80.69% yang memiliki target kinerja 1 laporan dan terealisasi 1 laporan

3) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, realisasi keuangan Rp.43.785.300,-atau sebesar 89.36% yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup satu wilayah dalam kabupaten/kota sebesar Rp.100.000.000,00 realisasi keuangan Rp. 98.482.600 atau 100% telah dilaksanakan pembagian beras yang berasal dari pengadaan beras 320 ton di 20 kecamatan kota Bandar Lampung, yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

4) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, realisasi

keuangan Rp. 10.976.600 ,- atau sebesar 15.58%,realisasi kegiatan 100% yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

- 2) Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, Rp.69.772.100,- atau sebesar 89.96%,realisasi kegiatan 100% yang memiliki target kinerja 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TAHUN 2022) YANG DIEVALUASI		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (TAHUN 2022)		% Realisasi
				K	Rp	K	Rp	
		Tolak Ukur		K	Rp	K	Rp	
		Tanpa (Zero) kelaparan di kota bandar lampung (no hungry)	%					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pangan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Hasil penilaian akuntabilitas kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai SAKIP OPD)	nilai	98	8.049.801.268		7.776.651.517	97%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah bidang pangan		98	3.750.753.143	100	3.461.384.997	92%

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang berkualitas	%	100	34.386.900	100	29.530.400	86%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Dinas pangan	dokumen		34.386.900		29.530.400	86%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6		6		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	%	100	3.050.533.998	93	2.826.975.097	93%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN Dinas Pangan kota Bandar Lampung	kali		2.983.173.998,00	14	2.764.415.097	93%
	jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	31		31		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi Keuangan Dinas Pangan tersedia	dokumen		67.360.000		62.560.000	93%
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	40		40		

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar operasional OPD	%	98	120.566.945	98	118.605.850	98%
Penyediaan Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket Komponen instalasi/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	1	2.441.295	1	2.440.000	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	1	10.903.500	1	10.853.500	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	1	5.000.000	1	4.500.000	90%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket					100%
	jumlah paket barang Barang Cetak dan Penggandaan	paket	1	12.332.150	1	12.322.350	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	dok					100%
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	paket	1	2.340.000	1	2.340.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase layanan makanan dan minuman tamu	persen					88%
		laporan	1	11.500.000	1	10.100.000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	partisipasi dalam rapat rapat konsultasi luar daerah	laporan					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	76.050.000	2	76.050.000	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		%	100	50.000.000	100	49.850.000	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	10	50.000.000	10	49.850.000	100%
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Jasa Penunjang kebutuhan OPD	%	98	358.750.000	75	308.000.000	86%
Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan					
	Persentase penyediaan layanan jasa pemeliharaan perlengkapan kantor	paket					
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan tenaga kontrak yang tersedia	bulan		358.750.000		308.000.000	

	jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	1		1		86%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris kantor yang Terpelihara	%	98	136.515.300	98	128.423.650	94%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	unit		31.872.100		27.597.150	87%
	jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	1		1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional /lapangan yang tersedia	unit		104.643.200		100.826.500	96%
	jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	unit	16		16		
Terpenuhinya Kebutuhannya	Skor PPH	skor				-	

n Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan aman Untuk Memenuhi kecukupan Energi perkapita	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				4.010.048.125,0	30	4.092.249.920	102%
		Ketersediaan Pangan Utama	%	98		100	-	
		Ketersediaan energi per kapita	kkal/Kap/hari	2500		3.096	-	
		Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	72,1		68,00	-	
		pencapaian skor PPH		85,5		88,20	-	
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	98	275.428.125	100	178.308.900	65%
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen					
		Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Neraca Bahan Makanan (NBM)	laporan	1	44.020.000	1	39.427.400	90%
	Koordinasi dan Singkronisasi pelaksanaan distribusi	data distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	dokumen		30.800.000		2.412.500	

Pangan Pokok dan pangan lainnya							8%
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	1		-		
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	dokumen					
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	1	200.608.125	1	136.469.000	68%
Pengelolaan keseimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota	persentase cadangan pangan pemerintah (per 100 ton)	%		3.700.000.000	320	3.699.956.920	100%
Pengadaan Cadangan pemerintah Kabupaten/Kota	penambahan jumlah cadangan pangan pemerintah	ton					
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	320	3.700.000.000	320	3.699.956.920	100%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	PPH konsumsi (angka kecukupan gizi)	skor	86	34.620.000	88,20	#REF!	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per	tersedianya data target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen		34.620.000		28.267.000	

Kapita per Tahun								
	Target konsumsi Pangan per kapita per tahun	dokumen	1		1		82%	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya kegiatan pameran			230.156.000		185.717.100		
	Terlaksananya lomba cipta menu tingkat kota bandar lampung							
	terlaksananya sosialisasi dan pembinaan penganekaragaman konsumsi Pangan				-			
	jumlah pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman	laporan	2		2		81%	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	3	%	7	149.000.000	-	142.267.900	95%	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang dihasilkan	dokumen	1	49.000.000	1	43.785.300	89%	

Penyusunan, pemutakhiran, dan analisis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan,	peta ketahanan pangan dan Kerentanan pangan tingkat kecamatan	dokumen						
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	1	49.000.000	1	43.785.300	89%	
Kegiatan penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/Kota	persentase daerah rawan dan rentan pangan yang tertangani	%	100	100.000.000	98	98.482.600	98%	
Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan Yang mencakup 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ton	1	100.000.000	1	98.482.600	98%	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	85,5	140.000.000	85,5	80.748.700	58%	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase tingkat keamanan pangan berdasarkan survei yang dilakukan secara acak di beberapa pasar tradisional dan modern	%	85,5	140.000.000	85,50	80.748.700	58%	

	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	data jumlah pelaku usaha yang dilatih , dan jumlah produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi	pelaku usaha PSAT (sudah tersertifikasi maupun belum)		70.000.000		10.976.600	
		KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	1		1		16%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasar tradisional dan modern yang diawasi dan dibina	pasar					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	70.000.000	1	69.772.100	99.67%
		Jumlah Total Anggaran Seluruh Program			8.049.801.268		7.776.651.517	
		Total capaian Kinerja dan anggranm dari seluruh program					96,61	

IV. PENUTUP

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada Dinas Pangan di Tahun Anggaran 2022 pencapaian kinerja Dinas Pangan sangat baik dengan realisasi anggaran maupun kinerja di atas 90 %

Berkaitan dengan belum tercapainya beberapa indikator kinerja pada Dinas Pangan maka upaya perbaikan akan dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan OPD dan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan sumberdaya yang ada, serta memperbaiki fungsi manajemen mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta Sumber Daya Manusia yang ada.

Hasil capaian kinerja tersebut seharusnya dapat segera diperbaiki untuk senantiasa berusaha berkinerja lebih baik sehingga diharapkan sasaran pada Renstra Dinas Pangan Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026 dapat terwujud dengan baik, demikian juga sasaran-sasaran stratejik berikutnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2022

**KEPALA DINAS PANGAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

I KADEK SUMARTA, S. SOS., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631125 198603 1 004